

## SEKURITISASI ISU SEPARATISME OLEH INDIA SEBAGAI JUSTIFIKASI PENCABUTAN OTONOMI KASHMIR

Harry Prananda Syahputra Daulay<sup>1\*</sup>, Dr Apriwan, S.Sos., MA<sup>2\*</sup>,  
Vituus Setyaka S.IP., M.Si<sup>3</sup>

Hubungan Internasional, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

E-mail: <sup>1</sup>[harryprananda21@gmail.com](mailto:harryprananda21@gmail.com)\*, <sup>2</sup>[apriwan@soc.unand.ac.id](mailto:apriwan@soc.unand.ac.id)\*, [vsetyaka@gmail.com](mailto:vsetyaka@gmail.com)\*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sekuritisasi isu separatisme oleh India sebagai justifikasi pencabutan otonomi Kashmir. Pencabutan otonomi khusus Kashmir oleh India merupakan suatu langkah awal Pemerintah India dalam memberantas isu separatisme yang sudah lama ada di Kashmir. Penelitian ini menggunakan konsep sekuritisasi yang dikemukakan oleh Barry Buzan, dkk yang membagi tahapan sekuritisasi menjadi 2, yaitu tahap pemunculan isu dan tahap meyakinkan audience. Proses awal sekuritisasi adalah tahap pemunculan isu melalui peran media massa, pengaruh partai politik, lalu dilanjutkan dengan tahap meyakinkan audience seperti pernyataan para elit politik India serta Masyarakat India. Sehingga menjadikan kebijakan pencabutan otonomi khusus Kashmir oleh India merupakan sebuah langkah awal sekuritisasi terhadap separatisme yang ada di Kashmir.

**Kata Kunci:** India, Narendra Modi, Sekuritisasi, Separatisme.

### Abstract

*This study examines the securitisation of Kashmir's separatism by the Indian government. This study argues that the government of India's securitisation effort seems like an initial step to revoke Kashmir's special autonomy. This study employed a securitisation framework, emphasising how two main stages of securitisation shape and influence the securitising process, including raising the issue and convincing the audience. I used a qualitative method by using descriptive analysis and secondary data sources. The Finding highlights that in the staging of raising the issue, the Indian government used media and political parties as speech act arena. In convincing the audience, Indian*

*political elites and Indian society become other domains in addressing Kashmir's separatism. Consequently, this thesis argues that revoking Kashmir's autonomy becomes a rational action and has acceptability in public discourse.*

**Keywords: India, Narendra Modi, Securitization, Separatism.**

## **PENDAHULUAN**

Konflik Kashmir merupakan sebuah konflik yang serius antara negara India dan Pakistan dimana dalam menyelesaikan konflik ini sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan baik di tingkat bilateral ataupun multilateral.<sup>1</sup> India dan Pakistan merupakan dua negara yang selalu memperebutkan mengenai teritori dari wilayah Kashmir, dimana konflik ini tidak pernah selesai.<sup>2</sup> Bagi suatu negara batas teritorial merupakan sebuah hal yang mutlak, sehingga menyebabkan isu-isu atau permasalahan dalam batas negara merupakan sebuah permasalahan yang sensitif.<sup>3</sup> Setelah terjadinya konflik di daerah Kashmir hubungan diplomatik yang terjadi diantara India dan Pakistan semakin tegang. serta pasukan-pasukan dari kedua negara tersebut terlibat saling tembak di wilayah Kashmir.<sup>4</sup>

Secara geografis wilayah Kashmir merupakan sebuah wilayah yang dialiri sungai-sungai besar seperti sungai Indus. Keberadaan dari sungai ini dapat

---

<sup>1</sup> Abdul Majid, "Kashmir: Konflik antara India dan Pakistan," Sebuah Jurnal Penelitian Asia Selatan," Vol. 31, No. 1, (Januari-Juni 2016). 49

<sup>2</sup>Rizky Alfi, "Pengaruh Perebutan Wilayah Kashmir Terhadap Hubungan Diplomatik India-Pakistan Periode 2011-2013," JOM FISIP, Vol. 3, No. 2. 3

<sup>3</sup> Mutiara Ita Dewi, "Dilema Masalah Kashmir Dalam Kerangka Hubungan India-Pakistan," Mozaik, Vol. 1, No. 1, Juli 2006

<sup>4</sup> Pipes Daniel, "Hubungan Diplomatik India-Asia Barat," Hindustan Times, 24 Februari 2016. Diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

menunjang pertumbuhan ekonomi dalam sektor pertanian. Dalam bidang militer wilayah Kashmir ini sendiri berada di daerah pegunungan sehingga dapat menjadi wilayah yang strategis bagi pertahanan suatu negara, dan juga berbatas langsung dengan beberapa negara seperti Afganistan, China, dan Tibet.<sup>5</sup> Dengan berbatas langsungnya wilayah Kashmir ini dengan Afghanistan, Tajikistan, Tibet dan China, India beranggapan bahwa dengan bergabungnya wilayah Kashmir dengan mereka dapat dijadikan sebuah peluang yang dapat mempengaruhi negara-negara tersebut, hal tersebut dikarenakan wilayah Kashmir ini sendiri merupakan sebuah pintu masuk untuk mempengaruhi negara-negara tersebut.<sup>6</sup>

Konflik yang terjadi di wilayah Kashmir ini merupakan sebuah konflik yang berkelanjutan, untuk meredam konflik tersebut Negara India memberikan otonomi untuk wilayah Kashmir untuk mengelola wilayah Kashmir itu sendiri pada tahun 1954.<sup>7</sup> Dalam pemberian hak otonomi ini tidak terlepas dari peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB). PBB mengeluarkan 11 resolusi Dewan Keamanan yang bersangkutan dengan konflik Kashmir ini di tahun 1948.

Separatisme yang terjadi diwilayah Kashmir bukanlah fenomena yang baru, tindakan separatisme ini dilatar belakangi oleh ketidakpuasan masyarakat

---

<sup>5</sup> Pribadi Jubaidi: Kashmir dan Timor Timur ( Peran PBB), ( Jawa Barat: Yayasan Pustaka Grafikasi: 1999), 40.

<sup>6</sup>Alfi Rizky ,”Pengaruh Perebutan Wilayah Kashmir Terhadap Hubungan Diplomatik India-Pakistan Periode 2011-2013,” JOM FISIP, Vol. 3, No. 2. 4

<sup>7</sup> Nurul Itsna Rosdiana,” Analisis Pencabutan Pemberlakuan Otonomi Khusus Kashmir dan Jammu Oleh Pemerintah India,” Jurnal Ilmu Sosial dan Humanira, Vol. 9, No. 2, Oktober 2020. 348

Kashmir terhadap Pemerintah India.<sup>8</sup> Pemberontakan yang terjadi di Kashmir bermula pada tahun 1988 yang dimulai oleh eksklusif muslim. Setelah pemberontakan yang terjadi pada tahun 1988 tersebut banyak bermunculan gerakan-gerakan separatisme di Kashmir seperti *Jamaat el islami*, dan *Kashmir National Liberation Front*.

Pada tahun 2014 Narendra Modi memenangkan pemilu India bersama dengan partai oposisi nasionalis India yaitu *Bharatiya Janata Party (BJP)*, dimana partai ini mendominasi kursi parlemen dari pemerintahan India, kemenangan ini tidak terlepas dari peran dan kharisma dari Narendra Modi.<sup>9</sup> Setelah kemenangan tersebut Narendra Modi berjanji akan melakukan pencabutan Artikel 370, dimana artikel ini berisikan hak istimewa bagi masyarakat Kashmir untuk melakukan otonomi dari wilayah mereka sendiri.<sup>10</sup>

Setelah terpilihnya Narendra Modi menjadi Perdana Menteri dari Negara India, pada tanggal 5 Agustus 2019 Modi mengumumkan bahwa India akan melakukan pencabutan Artikel 370 yang isinya merupakan sebuah perlindungan untuk masyarakat Kashmir yaitu seperti hak konstitusi dan

---

<sup>8</sup> Reshi Manzoor Ahmad, "Kashmir Insurgency: it's Changing Trends", *International Journal of Advance Research and Development*, Vol. 3, No. 9, 2018.

<sup>9</sup> The National Institute for Defence Studies, "Chapter 5 India: The Foreign and Security Policy under Modi Government," dalam *East Asia Strategic Review 2015*, (Tokyo: The Japan Time, Ltd, 2015): 171.

<sup>10</sup> Kurshid Khan dan Pervaiz Iqbal Cheema, "Modi's Kashmir Policy: The Probable Consequence for the Security of South Asia," *Strategic Studies*, Vol. 37 No. 3, (2017): 3.

otonomi.<sup>11</sup> Dalam pidatonya Modi mengatakan “ *Penghapusan Pasal 370 menandakan dimulainya era baru, status Kashmir telah digunakan sebagai senjata oleh Pakistan untuk menghasut sejumlah orang, namun kini India akan menyingkirkan terorisme dan para teroris dari daerah itu*”.<sup>12</sup> Pernyataan lain dari Pemerintah India tentang pencabutan artikel 370 ini adalah “*Sebuah era baru telah dimulai di Jammu dan Kashmir dan Ladakh. Pasal 370 merupakan rintangan bagi perkembangan Kashmir. Hak semua penduduk India adalah sama, dan tanggung jawab mereka juga sama. Kerugian yang dilakukan Pasal 370 terhadap orang-orang Jammu dan Kashmir dan Ladakh tidak pernah dibahas. Pasal 370 dan Pasal 35A hanya memberikan separatisme, nepotisme, dan korupsi kepada orang-orang Jammu dan Kashmir*”.<sup>13</sup> Kebijakan dari Pemerintah India untuk melakukan pencabutan Artikel 370 ini sendiri resmi disahkan pada tanggal 31 Oktober 2019.<sup>14</sup> Dengan adanya pencabutan Artikel 370 ini berakibat penolakan dari masyarakat Kashmir sendiri, dimana dengan adanya pencabutan ini bisa jadi memungkinkan pihak *unionist* bergabung dengan kelompok separatis yang ada

---

<sup>11</sup> Bilal Kuchay, “India Revokes Kashmir’s Special Status,” 4 September 2019, Al-Jazeera, diakses pada tanggal 5 Desember 2021, melalui: <https://www.aljazeera.com/news/2019/9/4/india-revokes-kashmirs-special-status>.

<sup>12</sup> BBC News, “PM India Membela Keputusannya Mencabut Status Khusus Kashmir,” 9 Agustus 2019, <https://news.detik.com/bbc-world/d-4659005/pm-india-membela-keputusannya-mencabut-status-khusus-kashmir>, diakses pada tanggal 2 Februari 2022.

<sup>13</sup> Business Today.in, “Article 370, Kashmir Issue: Key Quotes From PM Modi’s address to the Nation” 9 Agustus 2019, <https://www.businesstoday.in/latest/economy-politics/story/narendra-modi-address-nation-article-370-future-jk-10-major-points-219262-2019-08-09>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

<sup>14</sup> Hasan A.R, “India Resmi Membelah dan Menurunkan Status Jammu-Kashmir,” 8 November 2019 Retrieved, diakses melalui <https://www.liputan6.com/global/read/4099996/india-resmi-membelah-dan-menurunkan-status-jammu-kashmir>, diakses pada tanggal 1 Februari 2022

di wilayah Kashmir itu sendiri.<sup>15</sup> Masyarakat Kashmir juga melakukan demo dan memunculkan slogan yang berarti “ apa yang kami inginkan adalah kemerdekaan”.<sup>16</sup>

Pemerintah India banyak melakukan pelanggaran HAM di wilayah Kashmir, seperti pemerintah Negara India melakukan penangkapan masyarakat Kashmir tanpa ada tuduhan.<sup>17</sup> Pemerintah India juga melakukan pencabutan Artikel 370 tentang status hak istimewa bagi wilayah Kashmir, serta Pemerintah India juga melakukan tindakan peningkatan keamanan serta melakukan tindakan pemutusan jaringan telekomunikasi dan internet sehingga mengakibatkan gerak dari masyarakat di wilayah Kashmir menjadi terbatas.<sup>18</sup> Sheikh Ashiq Ahmed selaku Presiden KCCI (*Kashmir Chamber of Commerce and Industries*) atau Kamar Dagang dan Industri Kashmir mengungkapkan “ Dalam 120 hari terakhir kami telah melihat bagaimana setiap sektor telah berdarah-darah. Kami khawatir krisis ini akan semakin meningkat pada 2020”.<sup>19</sup> Adanya tindakan dari Pemerintah India ini berakibat terhadap turunnya tingkat perekonomian di wilayah Kashmir. Akibat dari pencabutan Artikel 370 ini wilayah Kashmir mengalami kerugian ekonomi sebesar kurang lebih

---

<sup>15</sup> Rather, Tariq Ahmad, dkk. “Abrogation of Article 370 of the Constitution of India: Socio-Economic and Political Implications in Jammu and Kashmir.” *IJRAR* Vol. 7, Issue. 3. 512-515

<sup>16</sup> Sultan Ahmed Ali, “Demographic Changes: A Challenge to the Decolonization of Kashmir,” *International Journal of Social Sciences*, Vol. 6, Issue 1, (2020). 411

<sup>17</sup> Joko Sadewo, “Infografis Desakan Hentikan Pelanggaran HAM di Kashmir”, *Republika.Co.ID*, Maret, 26, 2020.

<sup>18</sup> Rizky Jaramaya, “ Ekonomi Kashmir Turun Drastis Sejak Akses Dibatasi”, *Republika*, Desember, 18, 2019.

<sup>19</sup> Rizky Jaramaya.

US\$ 2,4 miliar.<sup>20</sup>Dari serangkaian penjabaran diatas tentang pencabutan otonomi Kashmir oleh Pemerintah India. Penjelsan tentang perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Kashmir sendiri, serta penindasan yang dialami masyarakat Kashmir. Penulis tertarik untuk meneliti sekuritisasi isu separatisme oleh India sebagai justifikasi pencabutan otonomi Kashmir.

## **METODE**

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif ini penulis berusaha menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan sekuritisasi separatisme oleh India dalam melakukan pencabutan otonomi Kashmir. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu deskriptif, dimana penulis berusaha mendiskripsikan apa yang mendasari India dalam melakukan pencabutan otonomi Kashmir. Batas penelitian yang diambil penulis yaitu dari tahun 2014-2019. Unit analisis dalam penelitian ini adalah sekuritisasi isu separatisme oleh pemerintah India. Tingkat analisis dari penelitian ini adalah Negara India. Pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, yaitu menggunakan data-data dari sumber skunder seperti buku-buku, jurnal, berita, dan juga website. Dalam menganalisis penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang relevan dan kemudian penulis sajikan dalam bentuk deskripsi. Analisis yang dilakukan oleh penulis menggunakan konsep

---

<sup>20</sup>Rizky Jaramaya, "Ekonomi Kashmir Turun Drastis Sejak Akses Dibatasi," *Republika.co.id*, 18 Desember 2019, <https://internasional.republika.co.id/berita/q2pe6y366/ekonomi-kashmir-turun-drastis-sejak-akses-dibatasi>, diakses pada 3 Desember 2021.

sekuritisasi oleh Copenhagen School, yakni Barry Buzan, Ole Weaver, dan Jaap de Wilde. Konsep ini sendiri dikemukakan dalam buku yang berjudul: *A New Frame Work of Analysis*. Barry Buzan dkk menjelaskan ada dua tahapan dalam melakukan sekuritisasi yaitu tahap pemunculan isu dan tahap meyakinkan audience

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini menjelaskan mengenai tahapan sekuritisasi yang dilakukan India dalam melakukan pencabutan otonomi Kashmir. penulis akan menganalisis penelitian ini dengan menggunakan konsep sekuritisasi yang dikemukakan oleh Coopenhagen School menggunakan dua tahapan sekuritisasi yaitu tahap pemunculan isu dan tahap meyakinkan audience.

### **1.1 Tahap Pemunculan Isu**

Pada konflik Kashmir, India memunculkan isu separatisme di Kashmir yang dapat mengancam kedaulatan India. Ini dapat terlihat dari India melakukan pencabutan terhadap hak otonomi khusus Kashmir ( Artikel 370 dan 35A) pada tahun 2019.<sup>21</sup> Narendra Modi selaku Perdana Menteri dari India melakukan perubahan terhadap konstotusi negara India terkait dengan wilayah Kashmir yang masuk kedalam India yang diberikan otonomi khusus yang tertera pada artikel 370. Pencabutan Artikel 370 merupakan perubahan status dari wilayah

---

<sup>21</sup> CNN Indonesia, India Cabut Status Daerah Istimewa dari Kashmir, 6 Agustus 2019, diakses pada 28 November 2022, melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190805160834-113-418536/india-cabut-status-daerah-istimewa-dari-kashmir>



Kashmir yang awalnya negara bagian menjadi wilayah kesatuan negara India.<sup>22</sup> Pencabutan otonomi khusus terhadap Kashmir yang dilakukan oleh Pemerintah India bertujuan untuk menghindari terorisme dan separatisme Kashmir. Ini terlihat dari pernyataan PM India, Narendra Modi “teman-teman, saya memiliki keyakinan penuh bahwa kita akan dapat membebaskan Jammu dan Kashmir dari terorisme dan separatisme di bawah sistem (baru) ini”.<sup>23</sup>

Isu separatisme merupakan sebuah isu yang sudah lama di India, serta memiliki keterkaitan dengan masalah keamanan Negara India. Setiap Perdana Menteri India memiliki cara-cara yang berbeda dalam menyikapi permasalahan separatisme Kashmir. . Setiap Perdana Menteri India memiliki perbedaan pandangan dalam menyikapi permasalahan separatisme di Kashmir, pada masa kepemimpinan Atal Bihari Vajpayee dan Manmohan Singh India lebih mengedepankan pembicaraan dengan para pemimpin kelompok separatisme Kashmir. Berbeda dari pendahulunya sebelumnya pada masa Pemerintahan Narendra Modi, Modi menggunakan hukum *Armed Forces Special Power Act*

---

<sup>22</sup> Helen Regan, India Downgrades kashmir’s Status and Takes Greater Control Over Contested Region, CNN World 31 Oktober 2019, diakses pada 28 November 2022 melalui, <https://edition.cnn.com/2019/10/31/asia/jammu-kashmir-union-territory-intl-hnk/index.html>.

<sup>23</sup> Kompas.com, Pm India Sebut Status Otonomi Khusus picu terorisme dan separatisme di Kashmir, 9 Agustus 2019, diakses pada 13 Desember 2022, melalui <https://internasional.kompas.com/read/2019/08/09/17353401/pm-india-sebut-status-otonomi-khusus-picu-terorisme-dan-separatisme-di?page=all>

(AFSPA) dan *Public Safety Act* dalam menyikapi permasalahan separatisme di wilayah Kashmir.<sup>24</sup>

Pada masa kepemimpinan PM Atal Bihari Vajpayee menjabat sebagai PM India pada tahun 1998 sampai 2004, India mencari solusi damai serta terbuka dalam menangani permasalahan di Kashmir. Keterbukaan ini dapat dilihat dari pernyataan Vajpayee di bulan Januari 2002 “*In our search for a lasting solution to the Kashmir problem, both in its external and internal dimensions, we shall not traverse solely on the beaten track of the past. Mindsets will have to be altered and historical baggage jettisoned*”.<sup>25</sup> Slogan Vajpayee merupakan suatu langkah awal terciptanya perdamaian di Kashmir serta melemahkan pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok militan Hurriyat di Kashmir. Vajpayee merupakan pemimpin yang memiliki visi, waktu, dan dihormati oleh kaum muslimin yang ada di Kashmir.<sup>26</sup>

Pada masa kepemimpinan PM Manmohan Singh menjabat sebagai PM India, Manmohan meminta bantuan kepada Vajpayee untuk membantunya dalam menyelesaikan permasalahan separatisme di Kashmir akan tetapi

---

<sup>24</sup> Mahmud Ershad. “Deconstructing Modi’s Kashmir Policy, 2014-2018.” *Journal of Contemporary Studies*. Vol. 7 No. 2 (2018). 7

<sup>25</sup> Samantra Bose, *Kashmir: Roots of Conflict, Paths to Peace*, (USA: Harvard University Press, 2003)

1.

<sup>26</sup> Andrew Whitehead, “Kashmir: the Vajpayee Years,” review dari *Kashmir: the Vajpayee Years* oleh A. S. Daulat dan Aditya Sinha, *Commonwealth & Comparative Politics*, Vol. 54, No. 3 (2016): 437.

permintaan tersebut ditolak oleh Vajpayee.<sup>27</sup> Pada tahun 2007 Manmohan melakukan diplomasi dengan Pakistan tentang Kashmir, kesepakatan tentang pemberian kemerdekaan terhadap Kashmir hampir terjadi.<sup>28</sup> Tidak terealisasinya kesepakatan ini dikarenakan Manmohan tidak mendapat dukungan dari partainya di India serta Musharraf yang menjabat sebagai Presiden Pakistan saat itu mulai kehilangan kekuatan dan legitimasinya.

Pada masa kepemimpinan Narendra Modi menjabat PM India, Modi menggunakan hukum *Armed Forces Special Power Act (AFSPA)* dan *Public Safety Act* dalam menyikapi permasalahan separatisme di Kashmir. Tujuan dari hukum ini adalah memberikan perlindungan terhadap pasukan keamanan serta melemahkan perlawanan di Kashmir. Kebijakan-kebijakan yang diambil Modi dalam menyikapi permasalahan di Kashmir lebih referensif serta keras dibanding dua pendahulunya.<sup>29</sup> *Armed Forces Special Power Act* merupakan sebuah hukum yang berisikan pengizinan terhadap angkatan bersenjata India untuk mengambil tindakan yang mereka anggap perlu termasuk penangkapan,

---

<sup>27</sup> Radha Kumar, "How Manmohan Singh Embarked on a Mission of Peace in Kashmir from 2004 Onwards," *Scroll.in Media News*, 27 November 2018, diakses 1 Desember 2022, melalui <https://scroll.in/article/903070/how-manmohan-singh-embarked-on-a-mission-of-peace-in-kashmir-from-2004-onwards>,

<sup>28</sup> Happymon Jacob, "The Kashmir Uprising and India-Pakistan Relations," *IFRI Center for Asian Studies* (2016). 13

<sup>29</sup> Mahmud Ershad. "Deconstructing Modi's Kashmir Policy, 2014-2018." *Journal of Contemporary Studies*. Vol. 7 No. 2 (2018). 7

pencarian, penangkapan, dan bahkan melakukan penembakan untuk menjaga hukum dan ketertiban di Kashmir.<sup>30</sup>

India memunculkan isu separatisme Kashmir berkaitan dengan momentum kemenangan yang didapatkan oleh Narendra Modi pada pemilu 2014 bersama partai BJP yang memenangkan mayoritas pada parlemen, ideologi Hindutva dan sentimen nasionalis Hindua telah mengikis fondasi sekuler dari negara India. Berkaitan kuat dengan ideology RSS dan nasionalis Hindu, Modi telah melancarkan upaya pembersihan terhadap etnis Muslim India, serta mereka yang berada di wilayah kependudukan India. Program terhadap Muslim yang diluncurkan oleh India dilakukan melalui undang-undang Amandemen Kewarganegaraan di tahun 2019.<sup>31</sup>

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II bahwa Kashmir yang didominasi oleh Muslim, maka Pemerintah India yang mayoritasnya di dukung oleh nasionalis Hindu memainkan isu agama untuk melawan separatisme Kashmir. Diperkuat dengan kebijakan-kebijakan India yang pro terhadap nasionalis Hindu yang menjadi mayoritas di India. hal tersebut menjadi sebuah bentuk India dalam memunculkan isu separatisme untuk menarik perhatian masyarakat mayoritas Hindu, yang dikaitkan dengan sentimen agama.

---

<sup>30</sup> Javed M Ansari, Modi Government's Clear Stand on Kashmir: AFSPA Would Neither be Lifted nor Diluted, India Today 7 September 2016, diakses pada 2 Desember 2022, melalui <https://www.indiatoday.in/india/story/kashmir-unrest-afspa-modi-all-party-meet-339762-2016-09-07>.

<sup>31</sup>Salma Malik & Nasreen Akhtar, " Explaining Jammu and Kashmir Conflict Under Indian Illegal Occupation: Past and Present", Margalla Papers, Vol.25, No.1, 2021. 28

Isu separatisme Kashmir merupakan sebuah isu yang penting bagi India. Hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional oleh Pemerintah India yang terkait dengan aspek ekonomi, tanpa adanya Kashmir India akan kehilangan pendapatan terhadap perdagangan di Asia Tengah. Hal ini dikarenakan letak Kashmir secara geografis berbatasan langsung dengan Afghanistan dan Xinjiang yang merupakan jantung penghidupan bagi ekonomi India. Potensi wisata alam yang ada di Kashmir sangat menjanjikan bagi perekonomian India serta Kashmir memiliki sumber daya alam yang melimpah.<sup>32</sup> Dengan adanya separatisme yang terjadi di Kashmir, maka hal tersebut membahayakan bagi India dan berdampak kepada kepentingan nasional mereka.

India menggambarkan isu separatisme yang ada di Kashmir merupakan sebuah isu yang membahayakan keamanan negara India dengan melakukan beberapa kebijakan yang telah dibuat India yang berfokus terhadap Kashmir. Pertama, India melakukan kebijakan pemukiman Hindu di Kashmir melalui partai *Bharatiya Janata Party (BJP)* telah mengambil alih pemerintahan Kashmir yang juga menjadi momentum pertama partai Nasionalis Hindu berkuasa di wilayah Kashmir.<sup>33</sup> India juga melakukan koalisi dengan Pemerintah Kashmir yang mengeluarkan suatu program bersama ( *Common Minimum Program*), program bersama tersebut berisi tentang sebuah

---

<sup>32</sup> Nurul Its Rosdiana, “ Analisis Pencabutan Pemberlakuan Otonomi Khusus Kashmir dan Jammu Oleh Pemerintah India”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 9, No. 2, 2020. 354

<sup>33</sup> Ike Agestu, Tiru Israel, India akan Bikin Pemukiman Hindu di Kashmir, *CNN Indonesia*, 10 April 2015, diakses pada 13 Desember 2022, melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150410192205-113-45803/tiru-israel-india-akan-bikin-permukiman-hindu-di-kashmir>

reformasi terhadap tata pemerintahan Kashmir beserta rincian mengenai permasalahan yang ada di Kashmir seperti permasalahan politik, keamanan, sosial, dan kemanusiaan.<sup>34</sup>

Diantara beberapa program tersebut, salah satu pokonya merupakan pengembalian dan rehabilitasi sebanyak 350.000 Kashmiri Hindu ( Kashmiri Pandit) ke wilayah Kashmir.<sup>35</sup> Komite tingkat tinggi telah dibentuk yang bertujuan untuk mengatur pelaksanaan *Agenda of Alliance* yang telah disepakati antara BJP dengan Pemerintah Kashmir. Bahkan isu telah banyak tentang penyerahan dokumen laporan pada Kelompok Menteri ( Group of Minister) yang berisi tentang cara dan sarana pengimplementasian beberapa bagian dari agenda aliansi. <sup>36</sup>

Pengembalian pemukiman dari umat Hindu (*Pandits*), akan menempatkan kembali *pandits* ditempatkan di tiga kota baru di Jammu & Kashmir. Dengan dikembalikannya umat Hindu ke tanah mereka di Kashmir, akan menjadikan *pandits* sebagai bagian dari Kashmir serta Pemerintah Kashmir akan memiliki pertimbangan terhadap mereka dalam membuat keputusan dan mengajukan proposal kebijakan. Meskipun Kashmir diberikan

---

<sup>34</sup> India Today, 15 Highlight of PDP-BJP Government Agenda in Jammu and Kashmir, 1 Maret 2015, diakses pada 13 Desember 2022, melalui <https://www.indiatoday.in/india/north/story/pdp-bjp-government-jammu-and-kashmir-common-minimum-programme-afspa-article-370-242550-2015-03-01>

<sup>35</sup> Sumit Hakhoo, BJP-PDP Struggle to Implement Agenda of Alliance, 28 Februari 2017, diakses pada 13 Desember 2022, melalui <https://www.tribuneindia.com/news/archive/features/bjp-pdp-struggle-to-implement-agenda-of-alliance-370282>

<sup>36</sup> Daily Excelsior, Breakthrough in PDP-BJP Agenda of Alliance, 2 Maret 2017, diakses pada 13 Desember 2022, melalui <https://www.dailyexcelsior.com/breakthrough-pdp-bjp-agenda-alliance/>

hak serta wewenang dalam melakukan kebijakan tersendiri akan tetapi Kashmir memerlukan persetujuan dari Pemerintah India di New Delhi. Otoritas dari Pemerintah India terhadap Kashmir sudah disebutkan dalam *Common Minimum Program* yang merupakan Agenda Alinasi yang terjadi, serta sudah disepakati oleh Pemerintah Kashmir dan Pemerintah India.<sup>37</sup>

Sejak tahun 1989 wilayah Kashmir yang tergabung dengan India telah mengalami tindakan separatisme dan terorisme yang dilakukan oleh kaum militan Muslim dan Pemberontakan terhadap ketidakpuasan terhadap Pemerintah India. Kelompok separatisme di Kashmir sering menyelip melintasi perbatasan dengan Pakistan yang bertujuan untuk menyulitkan kendali India terhadap Kashmir.<sup>38</sup> Kemudian terjadi penembakan artileri lintas batas yang dilakukan oleh militer Pakistan sehingga menyebabkan korban jiwa dari militer India, kerusakan terhadap properti yang ada di Kashmir, serta terjadinya ketegangan di perbatasan *India Over Kashmir*.<sup>39</sup>

Tahun 2016 India menempatkan 1.000.000 personil tentara di wilayah Kashmir yang tersebar pada *Loc ( Line of Control)*.<sup>40</sup> Tentara yang ditempatkan dibagi menjadi 5 regional yaitu yang bertempat di Utara, Selatan, Timur, Barat,

---

<sup>37</sup> Dewi Ayu Septa, Faktor-faktor yang Mempengaruhi India Dalam Membuat Kebijakan Pemukiman Umat Hindu di Kashmir Tahun 2015, <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/37692>.  
56

<sup>38</sup> South Asia: Kashmir: Terrorism and Repression, diakses pada 14 Desember 2022, melalui <http://www.cotf.edu/earthinfo/sasia/kashmir/KATopic5.html>.

<sup>39</sup> South Asia: Kashmir: Terrorism and Repression

<sup>40</sup> Lely Widyawati, Strategi India Dalam Mempertahankan Kashmir Sebagai Wilayah Integralnyam Skripsi, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010, 26, diakses pada 14 Desember 2022, melalui <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/11856/1/Halaman%20Judul.pdf>.

dan Tengah, pasukan ini berada dalam wilayah operasi *Northern Command*. Peran dari *Northern Command* adalah melakukan penjagaan terhadap wilayah perbatasan *Line of Control* yang rawan terjadi konflik.<sup>41</sup> Pada September 2016 terjadi penyerangan yang dilakukan oleh India terhadap wilayah yang berbatasan langsung dengan Pakistan di Kashmir. Pemerintah India mengatakan tujuan serangan tersebut adalah kelompok militan yang berbasis di Pakistan, India beranggapan bahwa kelompok tersebut merupakan ancaman terhadap *India Over Kashmir*.<sup>42</sup>

Cara-cara yang dilakukan India dengan melakukan kebijakan-kebijakan merupakan sebuah bentuk respon dan fokus India bahwa tindakan separatisme Kashmir berbahaya. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan India bertujuan untuk menekan kelompok-kelompok yang melakukan perlawanan dengan India. Pada puncaknya yaitu pencabutan otonomi khusus Kashmir, jika dahulu penyelesaian konflik India dan Kashmir masih menggunakan cara-cara yang bersifat soft atau dengan menggunakan pendekatan yang bersifat dialog, diplomasi, dan negosiasi. Artinya isu ini masih dapat dieskalasi secara terstruktur dan tidak sensitif di tengah masyarakat India. Namun, pada era PM Modi, dengan pengambilan kebijakan yang “keras”, maka isu ini adalah isu yang sensitif dan dapat mengancam kedaulatan India.

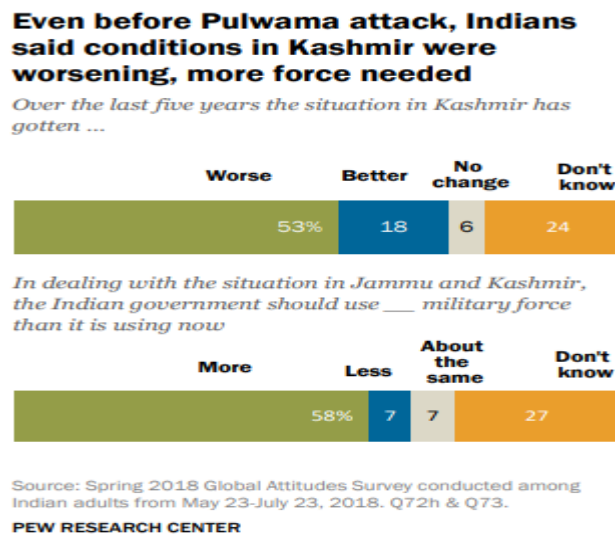
---

<sup>41</sup> Lely Widyawati. 26

<sup>42</sup> Dewi Ayuta Septa. 79



Isu Kashmir kemudian mendapatkan perhatian publik dapat dilihat dari sisi opini publik yang dimunculkan terhadap isu ini. Hal tersebut terlihat dari Pew Research India terhadap opini publik masyarakat India seperti di bawah ini.



### Opini Publik India Terhadap Permasalahan Separatisme Kashmir

**Sumber:** Kat Delvin, A Sampling of Public Opinion in India, Paw Research Center, 25 Maret 2019.<sup>43</sup>

Dari data diatas, mayoritas Masyarakat India (55%), melihat situasi yang terjadi di Kashmir merupakan sebuah permasalahan yang besar. Ketika ditanya bagaimana permasalahan di Kashmir berubah dalam lima tahun terakhir, sebanyak 53% menyatakan bahwa situasi di Kashmir semakin memburuk.

<sup>43</sup> Kat Delvin, A Sampling of Public Opinion in India, Paw Research Center, 25 Maret 2019, diakses pada 14 Desember 2022, melalui <https://www.indiaspend.com/wp-content/uploads/2019/03//Pew-Research-Center-India-Report.pdf>

Pandangan terhadap situasi yang baik sebanyak 18% dan yang percaya bahwa kondisinya sama saja hanya 6%. Ketika ditanya terkait bagaimana seharusnya strategi yang harus dilakukan oleh India dalam menyikapi permasalahan separatisme di Kashmir, mayoritas dari menjawab Pemerintah India harus menggunakan kekuatan militer yang lebih besar dalam merespon kelompok separatisme yang ada di Kashmir. Dan yang berpendapat India harus menggunakan kekuatan militer yang sama atau mengurangi kekuatan militer hanya 7%.

Para akademisi India beranggapan bahwa adanya pasal 370 ini malah memberi efek buruk untuk wilayah Kashmir itu sendiri. Hal ini dinyatakan oleh Brig Narender Kumar dalam penelitian yang berjudul *Rewriting the New Narrative of Jammu and Kashmir*. Dalam karyanya ini, Kumar menyatakan bahwa adanya Pasal 370 hanya akan membuat disjungsi antara hukum dan negara yang membawa pada pembusukan sistemik, pembiakan praktik korupsi, ketidak stabilan, kekerasan dan runtuhnya lembaga-lembaga pemerintah.<sup>44</sup> Hal serupa dinyatakan pula oleh Mishra, yang menyatakan bahwa Pasal 370 hanya menguntungkan bagi para penguasa dan bukan untuk rakyat, sehingga tidak progresif, diskriminatif dan dapat memberikan ancaman keamanan nasional

---

<sup>44</sup> Brig Narender Kumar, *Rewriting the New Narrative of Jammu and Kashmir*, Vivekanda International Foundation, 23 Maret 2020, diakses pada 14 Desember 2022, melalui <https://www.vifindia.org/2020/march/23/rewriting-the-new-narrative-of-jammu-and-kashmir>

pula.<sup>45</sup> Senada dengan Kumar dan Mishra, Priyadarshi dan Bhardwaj menyatakan pula bahwa hadirnya Pasal 370 ini digunakan Pakistan sebagai senjata mereka untuk merebut wilayah Kashmir dan Jammu.<sup>46</sup>

Kemudian, perhatian publik yang dapat dilihat dari isu separatisme Kashmir adalah, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pasukan militer India. Pada kawasan perbatasan, ada banyak peluang bagi kelompok garis keras untuk melarikan diri dari Afghanistan dan memasuki Kashmir. Seorang Perwira militer yang ada di Kashmir mengatakan “Kami harus melanjutkan patroli kami untuk menunjukkan kepada para militan bahwa kami dapat menjangkau ke mana pun kami mau dan kami dapat mengendalikan situasi,”<sup>47</sup>

Perwira tentara lainnya juga mengatakan “tugas adalah tugas, yang benar-benar kami inginkan adalah tidak ada dari kami yang terbunuh atau terluka sehingga kami semua dapat kembali ke rumah dan keluarga kami hidup-hidup”<sup>48</sup> Perwira tersebut juga tidak menyangkal bahwa mereka hidup dibawah tekanan serangan militant yang terus menerus dan ketakutan tersebut juga sudah menjadi bagian dari hidupnya. Pasukan militer India juga mengatakan “ Saya tidak melihat diri saya melawan non profesional seperti yang terjadi di

---

<sup>45</sup> Mishra N, “ Need of Article 370 in Present Political Setup in India: A Critical Study”, *International Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol.2, No. 3. 2015

<sup>46</sup> Bhardwaj S H, “ Equality in Law in Context of Abrogation of Article 370 & 35 A of Jammu Kashmir”, *Journal of The Gujarat Research Society*, Vol.21, No.2, 2019

<sup>47</sup> Surinder Singh Obergoi, *Ethnic Separatism and Insurgency in Kashmir*, diakses pada 15 Desember 2022, melalui <https://dkiapcss.edu/wp-content/uploads/2011/03/PagesfromReligiousRadicalismAndSecurityinSouthAsiach8.pdf>

<sup>48</sup> Surinder Singh Obergoi, *Ethnic Separatism and Insurgency in Kashmir*. 182

awal tahun Sembilan puluhan. Sekarang saya menemukan mereka lebih terlatih dan percaya diri”.<sup>49</sup>

Dengan beberapa opini publik yang terbentuk terhadap isu Kashmir, isu ini secara publik dapat dikatakan berbahaya karena dari jejak pendapat Pew Research India mengatakan isu ini penting sehingga perlu adanya tindakan militer dalam menanganinya. Hal tersebut ditambah dari akademisi India yang menganggap Pasal 370 memberikan dampak buruk terhadap India. Oleh karena itu, India melakukan tindakan militernya dengan melihat opini publik yang muncul.

## **1.2 Tahap Meyakinkan Audience**

Pencabutan Artikel 370 yang dilakukan oleh Pemerintah India menuai penolakan dari Masyarakat Kashmir, mantan Menteri Besar Jammu dan Kashmir Menhooba Mufti mengatakan “ mereka hanya ingin menduduki tanah kami dan ingin membuat negara bagian berpenduduk mayoritas muslim ini seperti negara bagian lain dan membuat kami menjadi minoritas dan mencabut wewenang kami secara total”.<sup>50</sup> Bharatiya Janata Party (BJP) sudah lama menentang adanya Artikel 370 Kashmir, BJP mengatakan “ Integrasi penuh dengan India akan memajukan pembangunan, dan menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk memberikan perlakuan berbeda kepada Jammu dan Kashmir

---

<sup>49</sup> Surinder Singh Obergoi, *Ethnic Separatism and Insurgency in Kashmir*. 182-183

<sup>50</sup> BBC News Indonesia, *Mengapa Pencabutan Status Daerah Istimewa Kashmir oleh India Dianggap Kontroversial? Tiga Hal yang Layak Diketahui*, 6 Agustus 2019, diakses pada 14 Desember 2022, melalui <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49250404>.

karena berpenduduk mayoritas muslim atau karena diakui sebagai bagian dari Pakistan”.<sup>51</sup> Para pemimpin BJP dan pemimpin partai besar di India banyak yang setuju dengan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah India tersebut mereka mengatakan bahwa pencabutan status istimewa Kashmir merupakan sebuah keputusan yang bersejarah.

Shri Amit Shah selaku Menteri Dalam Negeri India menyatakan “ selama 70 tahun rakyat India telah menyimpan aspirasi ini di dalam hati mereka bahwa Kashmir harus menjadi bagian integral dari India. Pasal 370 adalah satu-satunya penghalang jalan menuju mewujudkan tujuan ini. Menteri Dalam Negeri berterima kasih kepada Perdana Menteri atas langkah bersejarah ini untuk menghapus hambatan ini selamanya”<sup>52</sup> Pemimpin Partai Oposisi yang berada di Lok Sabha mengangkat masalah pencabutan Artikel 370 yang dilakukan oleh India, ia mengatakan “ Bagaimana pusat (Pemerintah India) dapat mengambil langkah ini secara sepihak ketika Kashmir adalah masalah bilateral antara India dan Pakistan dan ketika masalah tersebut tertunda di PBB. Menanggapi hal tersebut Shri Shah menantang partai oposisi bahwa mereka harus mengklarifikasi pendirian mereka apakah mereka mendukung mediasi PBB di Kashmir.

---

<sup>51</sup> BBC News Indonesia, Mengapa Pencabutan Status Daerah Istimewa Kashmir oleh India Dianggap Kontroversial? Tiga Hal yang Layak Diketahui

<sup>52</sup> Parliament approves Resolution to repeal Article 370; paves way to truly integrate J&K with Indian Union, Press Information Bureau Government of India Ministry of Home Affairs, 6 Agustus 2019. Diakses pada 14 Desember 2022, melalui <https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=192505#:~:text=Parliament%20approves%20Resolution%20to%20repeal,integrate%20J%26K%20with%20Indian%20Union&text=Union%20Minister%20for%20Home%20Affairs,J%26K%20in%20Lok%20Sabha%20today>.

Menteri Dalam Negeri India menjelaskan bahwa Artikel 370 pada awalnya merupakan ketentuan yang bersifat sementara. Karena adanya Artikel 370 pemberlakuan hukum Union of India tidak berlaku di kawasan Jammu dan Kashmir. dikarenakan tidak berlakunya hukum Union of India di Kashmir, menjadikan terorisme dan korupsi berkembang di Kashmir.<sup>53</sup>

Mengenai pengerahan pasukan militer di Kashmir dan penutupan fasilitas internet di Kashmir, Shri Shah mengatakan bahwa hal tersebut bertujuan untuk pencegahan terhadap elemen-elemen yang menghasut kekerasan di India. Shri juga mengatakan bahwa tidak ada yang dapat menghentikan Pemerintah untuk mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi perdamaian di dalam negeri. Shri Shah juga menegaskan bahwa Pemerintah India tidak akan melakukan pembicaraan dengan elemen separatis dan mereka yang mendukung tindakan terorisme di Kashmir, Pemerintah hanya akan berbicara dengan mereka yang berkomitmen untuk perdamaian dan pembangunan di Jammu dan Kashmir.<sup>54</sup>

Shri Shah berpendapat bahwa melakukan pencabutan Otonomi khusus Kashmir merupakan agenda yang komunal, karena Artikel 370 telah melanggengkan diskriminasi terhadap kaum minoritas seperti Sikh, umat Hindu. Shri Shah juga menyatakan bahwa Artikel 370 telah disalah gunakan

---

<sup>53</sup> Parliament approves Resolution to repeal Article 370; paves way to truly integrate J&K with Indian Union, Press Information Bureau Government of India Ministry of Home Affairs

<sup>54</sup> Parliament approves Resolution to repeal Article 370; paves way to truly integrate J&K with Indian Union, Press Information Bureau Government of India Ministry of Home Affairs

untuk menabur benih separatisme dan terorisme di Kashmir dan mencegah pembangunan. Shri Shah juga menyatakan bahwa pencabutan Artikel 370 bukanlah kesalahan sejarah, akan tetapi merupakan langkah bersejarah untuk memperbaiki kesalahan bersejarah.<sup>55</sup>

Sebagian besar Masyarakat India tidak mengerti mengapa Jammu dan Kashmir pantas untuk mendapatkan hak otonomi khusus. Partai oposisi di India juga banyak yang mendukung kebijakan India dalam melakukan pencabutan Artikel 370. Para politisi India merasa sudah waktunya bagi seluruh masyarakat India untuk menjadi warga negara yang setara, menurut mereka artikel 370 membuat masyarakat Kashmir merasa terasing dari bangsa India selama 7 dekade.<sup>56</sup>

Berdasarkan beberapa opini para elit politik India, artikel 370 merupakan sebuah alat yang digunakan untuk tumbuhnya benih separatisme dan terorisme di Kashmir, dan juga penyebab tidak berlakunya hukum Union of India di Kashmir, serta sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi di Kashmir. Pencabutan terhadap Artikel 370 merupakan sebuah langkah awal terbukanya pembangunan ekonomi yang lebih baik di Kashmir, dan sebuah cara untuk memberantas korupsi di Kashmir, serta merupakan langkah awal pembangunan

---

<sup>55</sup> Parliament approves Resolution to repeal Article 370; paves way to truly integrate J&K with Indian Union, Press Information Bureau Government of India Ministry of Home Affairs

<sup>56</sup> Mint, Opinion The Revocation of Article 370 ends a Foul Majoritarianism, 12 Agustus 2019, diakses pada 14 Desember 2022, melalui <https://www.livemint.com/opinion/columns/opinion-the-revocation-of-article-370-ends-a-foul-majoritarianism-1565549062884.html>

ekonomi di Kashmir. Pencabutan Artikel 370 dianggap sebagai langkah awal untuk membuat Masyarakat Kashmir agar tidak merasa terasing dari India.

## **Kesimpulan**

Dalam kebijakan pencabutan otonomi khusus Kashmir, Pemerintah India melakukan sekuritisasi terhadap isu separatisme di Kashmir yang dapat mengancam kedaulatan India. Pemerintah India menyatakan bahwa pencabutan otonomi khusus Kashmir merupakan cara untuk menghindari terorisme dan separatisme di Kashmir. Pemerintah India memunculkan isu separatisme pada awal kemenangan Narendra Modi pada tahun 2014 bersama partai BJP. Pemerintah India yang didukung oleh nasionalis Hindu memainkan isu agama dalam memunculkan isu separatisme yang ada di Kashmir, hal tersebut diperkuat dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah India yang pro terhadap Nasionalis Hindu yang menjadi mayoritas di India.

Dengan beberapa opini publik yang terbentuk terhadap isu Kashmir, isu ini secara publik dapat dikatakan berbahaya karena dari jejak pendapat Pew Research India mengatakan isu ini penting sehingga perlu adanya tindakan militer dalam menanganinya. Hal tersebut ditambah dari akademisi India yang menganggap Pasal 370 memberikan dampak buruk terhadap India. Oleh karena itu, India melakukan tindakan militernya dengan melihat opini publik yang muncul.



Berdasarkan beberapa opini para elit politik India, artikel 370 merupakan sebuah alat yang digunakan untuk tumbuhnya benih separatisme dan terorisme di Kashmir, dan juga penyebab tidak berlakunya hukum Union of India di Kashmir, serta sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi di Kashmir. Pencabutan terhadap Artikel 370 merupakan sebuah langkah awal terbukanya pembangunan ekonomi yang lebih baik di Kashmir, dan sebuah cara untuk memberantas korupsi di Kashmir, serta merupakan langkah awal pembangunan ekonomi di Kashmir. Pencabutan Artikel 370 dianggap sebagai langkah awal untuk membuat Masyarakat Kashmir agar tidak merasa terasing dari India

## Daftar Pustaka

Abdul Majid, “ Kashmir: Konflik antara India dan Pakistan,” Sebuah Jurnal Penelitian Asia Selatan,” Vol. 31, No. 1, (Januari-Juni 2016). 49

Alfi Rizky ,”Pengaruh Perebutan Wilayah Kashmir Terhadap Hubungan Diplomatik India-Pakistan Periode 2011-2013,” JOM FISIP, Vol. 3, No. 2. 4

Andrew Whitehead, “Kashmir: the Vajpayee Years,” review dari *Kashmir: the Vajpayee Years* oleh A. S. Daulat dan Aditya Sinha, *Commonwealth & Comparative Politics*, Vol. 54, No. 3 (2016): 437.

BBC News Indonesia, Mengapa Pencabutan Status Daerah Istimewa Kashmir oleh India Dianggap Kontroversial? Tiga Hal yang Layak Diketahui, 6 Agustus 2019, diakses pada 14 Desember 2022, melalui <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49250404>.

BBC News Indonesia, Mengapa Pencabutan Status Daerah Istimewa Kashmir oleh India Dianggap Kontroversial? Tiga Hal yang Layak Diketahui

BBC News, “ PM India Membela Keputusannya Mencabut Status Khusus Kashmir,” 9 Agustus 2019, <https://news.detik.com/bbc-world/d-4659005/pm-india-membela-keputusannya-mencabut-status-khusus-kashmir>, diakses pada tanggal 2 Februari 2022.

Bhardwaj S H, “ Equality in Law in Context of Abrogation of Article 370 & 35 A of Jammu Kashmir”, *Journal of The Gujarat Research Society*, Vol.21, No.2, 2019

Bilal Kuchay, “India Revokes Kashmir’s Special Status,” 4 September 2019, Al-Jazeera, diakses pada tanggal 5 Desember 2021, melalui: <https://www.aljazeera.com/news/2019/9/4/india-revokes-kashmirs-special-status>.

Brig Narendra Kumar, *Rewriting the New Narrative of Jammu and Kashmir*, Vivekanda International Foundation, 23 Maret 2020, diakses pada 14 Desember 2022, melalui <https://www.vifindia.org/2020/march/23/rewriting-the-new-narrative-of-jammu-and-kashmir>

Business Today.in, “ Article 370, Kashmir Issue: Key Quotes From PM Modi’s address to the Nation” 9 Agustus 2019 , <https://www.businesstoday.in/latest/economy-politics/story/narendra-modi-address-nation-article-370-future-jk-10-major-points-219262-2019-08-09>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

CNN Indonesia, India Cabut Status Daerah Istimewa dari Kashmir, 6 Agustus 2019, diakses pada 28 November 2022, melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190805160834-113-418536/india-cabut-status-daerah-istimewa-dari-kashmir>

Daily Excelsior, Breakthrough in PDP-BJP Agenda of Alliance, 2 Maret 2017, diakses pada 13 Desember 2022, melalui <https://www.dailyexcelsior.com/breakthrough-pdp-bjp-agenda-alliance/>

Dewi Ayu Septa, Faktor-faktor yang Mempengaruhi India Dalam Membuat Kebijakan Pemukiman Umat Hindu di Kashmir Tahun 2015, <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/37692>, 56

Happymon Jacob, "The Kashmir Uprising and India-Pakistan Relations," *IFRI Center for Asian Studies* (2016). 13

Hasan A.R, "India Resmi Membelah dan Menurunkan Status Jammu-Kashmir," 8 November 2019 Retrieved, diakses melalui <https://www.liputan6.com/global/read/4099996/india-resmi-membelah-dan-menurunkan-status-jammu-kashmir>, diakses pada tanggal 1 Februari 2022

Helen Regan, India Downgrades kashmir's Status and Takes Greater Control Over Contested Region, CNN World 31 Oktober 2019, diakses pada 28 November 2022 melalui, <https://edition.cnn.com/2019/10/31/asia/jammu-kashmir-union-territory-intl-hnk/index.html>.

Ike Agestu, Tiru Israel, India akan Bikin Pemukiman Hindu di Kashmir, CNN Indonesia, 10 April 2015, diakses pada 13 Desember 2022, melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150410192205-113-45803/tiru-israel-india-akan-bikin-permukiman-hindu-di-kashmir>

India Today, 15 Hilight of PDP-BJP Government Agenda in Jammu and Kashmir, 1 Maret 2015, diakses pada 13 Desember 2022, melalui <https://www.indiatoday.in/india/north/story/pdp-bjp-government-jammu-and-kashmir-common-minimum-programme-afspa-article-370-242550-2015-03-01>

Javed M Ansari, Modi Government's Clear Stand on Kashmir: AFSPA Would Neither be Lifted nor Diluted, India Today 7 September 2016, diakses pada 2 Desember 2022, melalui <https://www.indiatoday.in/india/story/kashmir-unrest-afspa-modi-all-party-meet-339762-2016-09-07>.

Joko Sadewo, "Infografis Desakan Hentikan Pelanggaran HAM di Kashmir", *Republika.Co.ID*, Maret, 26, 2020.

Kat Delvin, A Sampling of Public Opinion in India, Paw Research Center, 25 Maret 2019, diakses pada 14 Desember 2022, melalui <https://www.indiaspend.com/wp-content/uploads/2019/03//Pew-Research-Center-India-Report.pdf>

Kompas.com, Pm India Sebut Status Otonomi Khusus picu terorisme dan separatisme di Kashmir, 9 Agustus 2019, diakses pada 13 Desember 2022, melalui <https://internasional.kompas.com/read/2019/08/09/17353401/pm-india-sebut-status-otonomi-khusus-picu-terorisme-dan-separatisme-di?page=all>

Kurshid Khan dan Pervaiz Iqbal Cheema, "Modi's Kashmir Policy: The Probable Consequence for the Security of South Asia," *Strategic Studies*, Vol. 37 No. 3, (2017): 3.

Lely Widyawati, Strategi India Dalam Mempertahankan Kashmir Sebagai Wilayah Integralnyam Skripsi, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010, 26, diakses pada 14 Desember 2022, melalui <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/11856/1/Halaman%20Judul.pdf>.

Mahmud Ershad. "Deconstructing Modi's Kashmir Policy, 2014-2018." *Journal of Contemporary Studies*. Vol. 7 No. 2 (2018). 7

Mint, Opinion The Revocation of Article 370 ends a Foul Majoritarianism, 12 Agustus 2019, diakses pada 14 Desember 2022, melalui

<https://www.livemint.com/opinion/columns/opinion-the-revocation-of-article-370-ends-a-foul-majoritarianism-1565549062884.html>

Mishra N, "Need of Article 370 in Present Political Setup in India: A Critical Study", *International Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol.2, No. 3. 2015

Mutiara Ita Dewi, "Dilema Masalah Kashmir Dalam Kerangka Hubungan India-Pakistan," *Mozaik*, Vol. 1, No. 1, Juli 2006

Nurul Its Rosdiana, "Analisis Pencabutan Pemberlakuan Otonomi Khusus Kashmir dan Jammu Oleh Pemerintah India", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 9, No. 2, 2020. 354

Parliament approves Resolution to repeal Article 370; paves way to truly integrate J&K with Indian Union, Press Information Bureau Government of India Ministry of Home Affairs, 6 Agustus 2019. Diakses pada 14 Desember 2022, melalui [https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=192505#:~:text=Parliament%20approves%20Resolution%20to%20repeal,integrate%20J%26K%20with%20Indian%20Union&text=Union%20Minister%20for%20Home%20Affairs,J%26K\)%20in%20Lok%20Sabha%20today](https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=192505#:~:text=Parliament%20approves%20Resolution%20to%20repeal,integrate%20J%26K%20with%20Indian%20Union&text=Union%20Minister%20for%20Home%20Affairs,J%26K)%20in%20Lok%20Sabha%20today).

Pribadi Jubaidi: *Kashmir dan Timor Timur (Peran PBB)*, (Jawa Barat: Yayasan Pustaka Grafikasi: 1999), 40.

Pipes Daniel, "Hubungan Diplomatik India-Asia Barat," *Hindustan Times*, 24 Februari 2016. Diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

Radha Kumar, "How Manmohan Singh Embarked on a Mission of Peace in Kashmir from 2004 Onwards," *Scroll.in Media News*, 27 November 2018, diakses 1 Desember 2022, melalui <https://scroll.in/article/903070/how-manmohan-singh-embarked-on-a-mission-of-peace-in-kashmir-from-2004-onwards>,

Rather, Tariq Ahmad, dkk. "Abrogation of Article 370 of the Constitution of India: Socio-Economic and Political Implications in Jammu and Kashmir." *IJRAR* Vol. 7, Issue. 3. 512-515

Reshi Manzoor Ahmad, "Kashmir Insurgency: it's Changing Trends", *International Journal of Advance Research and Development*, Vol. 3, No. 9, 2018.

Rizky Jaramaya, "Ekonomi Kashmir Turun Drastis Sejak Akses Dibatasi", *Republika*, Desember, 18, 2019.

Salma Malik & Nasreen Akhtar, "Explaining Jammu and Kashmir Conflict Under Indian Illegal Occupation: Past and Present", *Margalla Papers*, Vol.25, No.1, 2021. 28

Samantra Bose, *Kashmir: Roots of Conflict, Paths to Peace*, (USA: Harvard University Press, 2003) 1.

South Asia: Kashmir: Terrorism and Repression, diakses pada 14 Desember 2022, melalui <http://www.cotf.edu/earthinfo/sasia/kashmir/KAtopic5.html>.

Sultan Ahmed Ali, "Demographic Changes: A Challenge to the Decolonization of Kashmir," *International Journal of Social Sciences*, Vol. 6, Issue 1, (2020). 411

Sumit Hakhoo, BJP-PDP Struggle to Implement Agenda of Alliance, 28 Februari 2017, diakses pada 13 Desember 2022, melalui <https://www.tribuneindia.com/news/archive/features/bjp-pdp-struggle-to-implement-agenda-of-alliance-370282>

Surinder Singh Obergoi, *Ethnic Separatism and Insurgency in Kashmir*, diakses pada 15 Desember 2022, melalui <https://dkiapcss.edu/wp-content/uploads/2011/03/PagesfromReligiousRadicalismandSecurityinSouthAsiach8.pdf>

The National Institute for Defence Studies, "Chapter 5 India: The Foreign and Security Policy under Modi Government," dalam *East Asia Strategic Review 2015*, (Tokyo: The Japan Time, Ltd, 2015): 171.